BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi. Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai tara kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.²

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan, terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita,

¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

² Angger Sigit dan Fuandy, *Sistem Peradilan Anak*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hal. 1.

baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Segala bentuk perlakuan salah pada anak tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat salah, anak tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberi tahu anaknya.³

Pada era globalisasi ini, semakin banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan banyaknya persaingan kerja maupun persaingan usaha, tak jarang orang tua menjadikan anak sebagai pelampiasan emosinya yang berujung pada kekerasan seksual. Seharusnya orang tua menjaga serta merawat sang anak, bukan menjadikan anak sebagai bahan pelampiasan dari emosionalnya.

Kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor, bukan hanya faktor persaingan dunia kerja maupun dunia usaha. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan, yaitu pengaruh dari dalam diri seseorang yang mengakibatkan orang tersebut berbuat kekerasan, kemudian lingkungan tempat tinggal seseorang tersebut, faktor ekonomi yang kekurangan dari segi materil akan membuat seseorang untuk melakukan perbuatan kasar, serta faktor pendidikan yang rendah juga dapat membuat seseorang berbuat kasar dalam segala penyelesaian segala masalah.

Kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak seperti persetubuhan, mengakibatkan terampasnya dan tertindasnya hak-hak anak.

Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 13.

mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya anak harus dilindungi. Selain itu anak berhak atas perlindungan dari berbagai macam kekerasan.

Penulis memberikan sebuah contoh kasus yang pernah terjadi di daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bahwa pada tanggal 1 September 2018, sekitar pukul 11.00 WIB , bertempat di dipinggir jalan Bandungsari II, Desa Bandungrejo, Rt.08, Rw. 05, Kec. Mranggen, Kab. Demak Terdakwa S dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan cara, Terdakwa yang merupakan tukang odong-odong merayu dan membujuk Saksi Anak Korban KRK, Saksi Anak Korban AS dan Saksi Anak Korban KRH untuk bermain odong-odong miliknya secara gratis atau tidak usah membayar, sehingga ketiga Saksi Anak Korban tersebut mau bermain odong-odong milik terdakwa. Setelah ketiga Saksi Anak Korban berada atau disekitar Odong-odong terdakwa melakukan aksinya secara bergantian.

Korban KRK, setelah naik odong-odong dan duduk ditempat duduk belakang sambil mengayuh ontelan, sedangkan posisi terdakwa berada di sebelah kiri Saksi Anak Korban, kemudian secara paksa memasukkan tangan kirinya kedalam rok Saksi anak korban melalui atas, setelah tangan kirinya masuk kedalam rok, kemudian jari tengah dan jari telunjuk dimasukkan kedalam celana dalam Saksi Anak Korban lalu memegang dan mengelus-elus kemaluan atau vagina Saksi Anak Korban dengan jarinya.

Korban AS, setelah naik odong-odong dan duduk ditempat duduk kapal-kapalan, sedangkan posisi Terdakwa berada di sebelah kiri Saksi Anak Korban, kemudian secara paksa memasukkan tangan kirinya kedalam celana pendek Saksi anak korban melalui atas, setelah tangannya masuk kedalam celana pendek, kemudian jari tengah dan jari telunjuk dimasukkan kedalam celana dalam Saksi Anak Korban lalu memegang dan mengelus-elus kemaluan atau vagina Saksi Anak Korban dengan jarinya.

Korban KRH, tidak naik odong-odong melainkan berdiri disamping odong-odong, sedangkan Terdakwa berada di belakang Saksi Anak Korban, kemudian secara paksa Terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan atau vagina Saksi Anak Korban dengan tangan kirinya dari luar.

Dari kejadian tersebut Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah karena telah melanggar peraturan Perundang-undangan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No.12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Demak No.230/Pid.Sus/2018/PN.Dmk.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Sedangkan isi dari Pasal 76 E Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No.12 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas kasus persetubuhan terhadap anak sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, kejaksaan maupun hakim.

Pemerintah bertanggung jawab mendukung perlindungan anak dengan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat optimal dan terarah. Sama halnya dengan upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, yang harus dilakukan secara konsisten khususnya aparat penegak hukum dan masyarakat yang sama-sama mempunyai kewajiban dalam hal menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Demak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam penerapan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana Pencabulan terhadap anak.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penerapan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana Pencabulan terhadap anak.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penerapan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana Pencabulan terhadap anak.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana Pencabulan terhadap anak.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Tindak Pidana

Menurut **Moeljatno**, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1470.

⁶ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651.

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁷

3. Pencabulan

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa baik dengan cara kekerasan atau ancama kekerasan⁸

4. Anak

Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa, adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.⁹

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan bahan hukum yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987, hal. 37

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencabulan.html> di akses pada tanggal 14 Mei 2019, Pukul 13.54 WIB

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/anak.html> di akses pada tanggal 24 September 2019, Pukul 23.58 WIB

yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁰dimana metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*? (Malang:Bayumedia Publishing, 2006), hal.295

⁹Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,198),hal 10.

penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Kualitatif dimana penelitian ini yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto⁹ dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan hukum yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa maksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Normatif, maka bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-

putusan hakim.¹²Berikut rincian sumber bahan hukum primer yang digunakan:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Manfaat lain dari bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.¹³

¹² Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, hal 181

¹³ http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan_hukum-primer-dan-bahan_hukum-sekunder.html diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 14.08 WIB

4. Metode Pengumpulan Bahan hukum

Dalam usaha pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch*)

Untuk mengumpulkan bahan hukum teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan bahan hukum dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini bahan hukum diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis bahan hukum-bahan hukum yang didapatkan melalui penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti yang berhubungan dengan diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan

bahan hukum deskriptif analisis. Bahan hukum deskriptif analisis adalah bahan hukum yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pencabulan dan Tinjauan Umum tentang Anak serta Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.